

**RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun 2022.

Rencana Kerja ini memuat Latar Belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu yang berupa capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan Program dan kegiatan, telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja, program dan kegiatan serta catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung ini dibuat sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : Maret 2021
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung,



FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19780419 199612 2 001

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB	I. PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB	II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	17
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	20
	2.5. Penelaahan Usul Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan.....	30
BAB	III. TUJUAN, SASARAN,	
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	35
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	38
	3.3. Rumusan Program dan Kegiatan	41
BAB	IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	
	4.1 Matriks Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022.....	51
BAB	V. PENUTUP	58
LAMPIRAN		

B A B I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi Program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024. Proses penyusunan Rencana Kerja meliputi : (1) Persiapan Penyusunan Rencana Kerja; (2) Penyusunan rancangan Rencana Kerja; (3) Penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja; dan (4) Penetapan Rencana Kerja.

Rencana Kerja merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah yang disusun per tahun selama kurun waktu lima tahun dan dibuat pada awal tahun. Rencana Kerja memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Kabupaten/Kota.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang strategis. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah melalui Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun 2022 berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga;
25. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
26. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024.
34. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Lampung
35. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung adalah merupakan penjabaran dan tindak lanjut/*break down* dari Rencana Strategis, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibiayai oleh dana APBD Provinsi Lampung Tahun 2022.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, merupakan rencana pembangunan tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan,

Sasaran Program dan Kegiatan dalam rangka penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di Provinsi Lampung.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 adalah :

- 1.3.2.1 Sebagai pedoman kerja dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perangkat Daerah serta kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun 2022.
- 1.3.2.2 Sebagai pedoman kerja dalam rangka penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2022.
- 1.3.2.3 Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Arah Kebijakan Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- 1.3.2.4 Sebagai tindak lanjut dalam bentuk program aksi atau kegiatan yang lebih khusus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2019-2024 yang memuat Program/Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Untuk memahami lebih jelas mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah ini, maka uraian-uraian yang terdapat pada Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun anggaran 2022.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2022 yang didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 serta Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung adalah penjabaran dari Rencana Strategis yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan kemudian dievaluasi pada akhir tahun anggaran dan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Adapun capaian analisis kinerja dan rekapitulasi pelaksanaan Renja tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Provinsi Lampung

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program s/d Akhir Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
				Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2020 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	287.060kwh	57500 Kwh	57500 Kwh	57500 Kwh	100	57500 Kwh	57500 Kwh	20,03
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pegawai Administrasi Keuangan	323 orang	77 orang	77 orang	77 orang	100	77 orang	77 orang	23,84
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan ATK	12.008 buah	2170 buah	2170 buah	2170 buah	100	2170 buah	2170 buah	18,07
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan administrasi perkantoran	71.838 buah	7459 buah	7459 buah	7459 buah	100	7459 buah	7459 buah	10,38
Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	104 unit	32 unit	32 unit	32 unit	100	32 unit	32 unit	30,77
Penyediaan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	Jumlah Pengadaan Peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	5.753 buah	1153 buah	1153 buah	1153 buah	100	1153 buah	1153 buah	20,04
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	26.900 exp	2630 exemplar	2630 exemplar	2630 exemplar	100	2630 exemplar	2630 exemplar	9,78
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum yang disediakan	7.050 orang	605 orang	605 orang	605 orang	100	605 orang	605 orang	8,58
Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi	754 kali	120 kali	120 kali	120 kali	100	120 kali	120 kali	15,92
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga PTHL	49 orang	9 orang	9 orang	9 orang	100	9 orang	9 orang	18,37

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program s/d Akhir Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
				Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2020 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Ketersediaan Sarpras Kantor								
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	246unit	31 unit	31 unit	31 unit	100	31 unit	31 unit	12,6
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang direhap	5 gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100	1 Gedung	1 Gedung	20
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di servis	55 unit	15 unit	15 unit	15 unit	100	15 unit	15 unit	27,27
Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan/servis terhadap Peralatan Gedung kantor	608 kali	168 kali	168 kali	168 kali	100	168 kali	168 kali	27,63
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran								
Pengembangan budaya kerja dan disiplin aparatur	Jumlah dokumen pemutakhiran Anjab, ABK, Evjab dll	25 dok	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	5 dokumen	20
PROGRAM PERENCANAAN, EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN SERTA ASSET PERANGKAT DAERAH	Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi sesuai Peraturan								
Penyusunan, Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	40 dok	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100	8 Dokumen	8 Dokumen	20
Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan capaian Keuangan OPD	20 dok	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	20
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	85 dok	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	100	17 Dokumen	17 Dokumen	20
Penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan asset	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	5 dok	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	20
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan PUG								
Strategi Percepatan PUG dan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan (APE)	Jumlah peserta Penguatan Kapasitas PUG dan Rakor Kaukus Parlemen	5.700 orang	400 orang	400 orang	400 orang	100	400 orang	400 orang	7,02

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program s/d Akhir Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
				Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2020 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengembangan PUG Ekonomi	Jumlah peserta pembentukan pokja IR dan rapat pelaksanaan bimtek	7.500 orang	120 orang	120 orang	120 orang	100	120 orang	120 orang	1,6
Pembangunan Ketahanan Keluarga	Jumlah Peserta Parenting Skill, Musda, HUT DWP	75 kab/kota	8Kab/Kota	8Kab/Kota	8Kab/Kota	100	8Kab/Kota	8Kab/Kota	10,67
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK	Jumlah Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak								
Forum Anak Daerah	Jumlah peserta rapat FAD	5.000 orang	40 orang	40 orang	40 orang	100	40 orang	40 orang	0,8
Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak	Jumlah peserta fasilitasi evaluasi KLA	15Kab/Kota	8 Kab/kota	8 Kab/kota	8 Kab/kota	100	8 Kab/kota	8 Kab/kota	13,11
Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Jumlah peserta rapat puspaga	2.250 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100	30 orang	30 orang	1,33
PROGRAM PERLINDUGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TRAFFICKING, KEKERASAN, PELECEHAN SEKSUAL SERTA PADA SITUASI KHUSUS DAN DARURAT	Persentase Kader Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terlatih dalam Pencegahan dan Penanganan Korban Perempuan dan Anak								
Sinkronisasi dan Monitoring Kasus Trafficking dan Ketenagakerjaan	Jumlah peserta rapat GP2SP	685 orang	60 orang	60 orang	60 orang	100	60 orang	60 orang	208,76
Peningkatan Perlindungan Anak	Jumlah Desa/Kab PATBM yang terbentuk	70 desa	2Kab/kota	2Kab/kota	2Kab/kota	100	2Kab/kota	2Kab/kota	2,86
Perlindungan Perempuan dan Anak pada Daerah Rawan Konflik dan Bencana serta Penanganan Medis Korban Kekerasan oleh UPT PKTK	Jumlah peserta Rakor P3AKS, Pelatihan Kader, PHI dan Penanganan Medis Korban Kekerasan oleh UPT PKTK	2750 orang	150 orang	150 orang	150 orang	100	150 orang	150 orang	5,45
PROGRAM OPERASIONAL PELAYANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Ketatausahaan dan Operasional Rumah Aman UPTD PPA	Persentase Pelayanan Ketatausahaan dan Operasional Rumah Aman UPTD PPA	360 kasus	118 Kasus	72 Kasus	72 Kasus	100	72 Kasus	72 Kasus	20
Pelayanan Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Pelayanan Pengaduan terhadap Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak	625kasus	118 kasus	118 kasus	118 kasus	100	118 kasus	118 kasus	18,88

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program s/d Akhir Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
				Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2020 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Penanganan terhadap Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak	625 kasus	118 kasus	118 kasus	118 kasus	100	118 kasus	118 kasus	18,88
PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Data Gender dan Anak yang up to date		-	-	-	-	-	-	-
Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Peserta Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.580 orang	7 orang	7 orang	7 orang	100	7 orang	7 orang	0,44
Penyelenggaraan Data dan Informasi Gender	Jumlah Dokumen Terpilah Gender dan Hak Anak	5 dok	1 doK	1dok	1dok	100	1 dok	1dok	20
Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah publikasi KIE PPPA	80 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100	6 unit	6 unit	7,5
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana									
'PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Akseptor KB Aktif								
Penguatan Program KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah Peserta Sosialisasi Penguatan Program KB bagi Remaja	1.300 orang	450 orang	450 orang	450 orang	100	450 orang	450 orang	34,62
Fasilitasi Pembinaan Keluarga Sejahtera	Jumlah kader pembinaan keluarga sejahtera	750 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100	50 orang	50 orang	6,67
Pengembangan Informasi Dalduk/ KB dan Pendidikan Kependudukan	Jumlah peserta pendidikan kependudukan	750 orang	80 orang	80 orang	80 orang	100	80 orang	80 orang	10,67

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

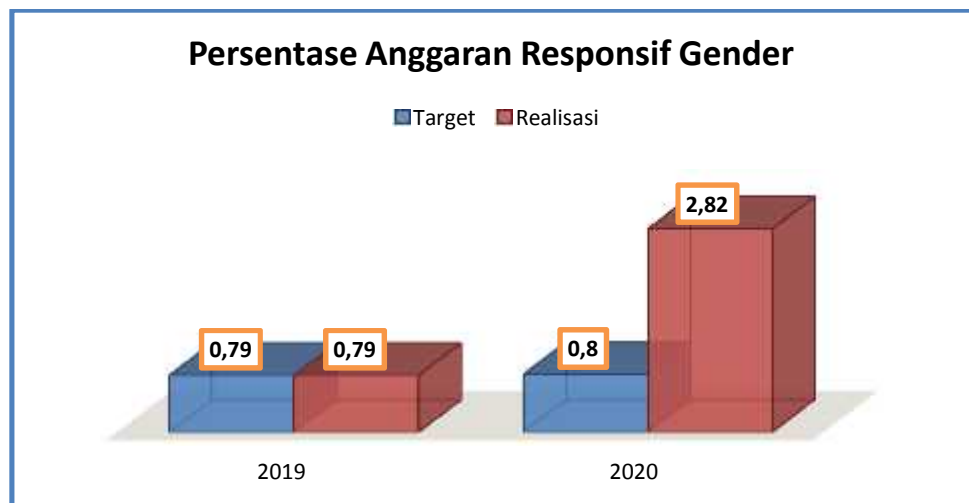
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada sasaran strategis dan Indikator-indikator yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama dalam rangka untuk Meningkatkan Kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.

Adapun kinerja yang telah dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

No	Indikator Tujuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	2,82	2,82	3	3,1	3,2	2,82	2,82	3	3,1	
2.	Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	53,33	86,67	100	100	100	46,67	86,67	100	100	
3.	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Cakupan KB Aktif (CPR)	15,9	66,88	67,29	67,71	68,24	15,9	66,68	67,29	68,24	

Grafik Capaian Indikator Kinerja T.A. 2019-2020





2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tingkat kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun bersangkutan. Dalam penentuan serta pelaksanaan program dan kegiatan, terjalin koordinasi dengan kabupaten/kota. Koordinasi yang dilakukan dengan kab/kota yaitu mensinkronkan program dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara Provinsi dan Kab/Kota. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung juga melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan program dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kab/kota. Hasil dari monitoring dan evaluasi digunakan sebagai masukan dalam penyusunan rencana kerja pada tahun berikutnya.

Selama pelaksanaan tugas dan fungsi yang tertuang dalam program dan kegiatan tahun 2020, terdapat beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi antara lain:

1. Permasalahan

- a) Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar 87,18 hingga pada tahun 2018 mencapai 90,57 namun pada tahun 2019 sedikit terjadi penurunan menjadi 90,39. Capaian ini masih sedikit di bawah capaian nasional yaitu sebesar 91,07.

Hal tersebut menunjukkan kesetaraan gender di Provinsi Lampung sedikit menjauh sehingga perlu upaya peningkatan pelembagaan PUG.

- b) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Lampung dari tahun 2010 hingga tahun 2019 mengalami fluktuasi naik turun disetiap tahunnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu intervensi lebih lanjut terkait peran perempuan dalam pembangunan utamanya dalam bidang politik dan ekonomi yang dipandang masih belum optimal.

- c) Kabupaten/Kota yang memenuhi indikator KLA dari tahun 2018 sebanyak 3 Kabupaten/Kota di tahun 2019 meningkat menjadi 7 Kabupaten/Kota namun masih di bawah capaian target nasional, pada tahun 2020 dikarenakan kondisi pandemic covid 19 penilaian KLA ditiadakan.

Upaya fasilitasi dan pendampingan kepada Kabupaten/Kota terus ditingkatkan menuju seluruh Kabupaten/Kota yang memenuhi indikator KLA.

- d) Kekerasan pada perempuan dan anak dalam setahun terakhir mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 terdata 151 kasus (37 kasus perempuan dan 114 kasus anak) dan pada tahun 2020 terdata 146 kasus (28 kasus perempuan dan 118 kasus anak).

Hal tersebut dikarenakan upaya pencegahan terus berjalan.. Namun demikian penurunan data kekerasan yang terjadi tersebut juga tidak menutup kemungkinan dikarenakan dari sikap tertutup keluarga yang menganggap peristiwa kekerasan yang menimpa korban (dalam rumah tangga) sebagai aib yang harus ditutupi. Hal ini menyulitkan pendamping untuk melakukan penanganan terhadap korban dan mengarahkan keluarga untuk mengambil langkah tepat bagi penyelesaian kasus, keamanan korban, dan kelanjutan hidupnya. Karena itu upaya sosialisasi untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak utamanya di rumah terus dilakukan dengan intens oleh UPT-PPA Provinsi Lampung.

- e) Terkait dengan data kasus, ditemukan kesulitan dalam perekaman data penanganan kasus yang seharusnya dapat dilakukan secara berkelanjutan. Ada beberapa kasus yang mendapat pelayanan kesehatan dan pendampingan hukum hingga tuntas namun luput terekam dalam buku data. Ini terjadi karena UPTD PPA memerlukan dukungan sumber daya manusia yang dapat menjalankan tugas rutin melakukan input data ke aplikasi SIMFONI-PPA, sistem informasi online untuk data kekerasan pada perempuan dan anak yang diinisiasi oleh Kementerian PPPA RI.
- f) Persentase pemakaian kontrasepsi modern / mCPR pada pasangan usia subur di Provinsi Lampung pada tahun 2020 sebesar 74,14 % diatas target/sasaran Provinsi Lampung sebesar 66,47 %.
- g) Unmet Need (PUS yang tidak ingin mempunyai anak lagi dan ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak ber-KB) masih bersifat fluktuatif. Pada tahun 2020 Unmet Need pada PUS di Provinsi Lampung masih tergolong tinggi yaitu sebesar 12,004%.
Tingginya Unmet Need disebabkan rendahnya kesadaran PUS untuk ber-KB, disamping jumlah PLKB yang terbatas sehingga untuk menekan laju peningkatan Unmet Need belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- h) Melemahnya ekonomi global pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19 memberikan beban ganda bagi perempuan baik dari sisi ekonomi maupun keluarga, selain itu kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat.
Dampak Pandemi Covid 19 pada tahun 2020 juga mengakibatkan refocusing terhadap program kegiatan Dinas PPPA yang menyebabkan banyak target-target program kegiatan tidak tercapai dengan optimal.
- i) Penyusunan anggaran responsif gender adalah belum optimalnya implementasi PUG pada perangkat daerah di Provinsi Lampung. Anggaran responsif gender yang mencapai 2,82% dari APBD

Provinsi Lampung masih sangat kecil dibandingkan target nasional yang mencapai 75%. Hal ini dikarenakan anggaran responsif gender yang disusun oleh PD hanya 1 atau 2 kegiatan, belum untuk sebagian besar kegiatan sesuai tupoksi Dinas masing-masing. Serta belum semua PD di Provinsi Lampung memiliki data terpilah gender yang merupakan instrument penting dalam penyusunan anggaran responsif gender. Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam mendorong terlaksananya kesetaraan gender dalam sendi-sendi pembangunan masyarakat masih terus diperjuangkan. Lembaga pemerintah adalah motor penggerak paling penting dalam menentukan kebijakan pembangunan yang mampu menciptakan kesejahteraan tanpa diskriminasi, dan karenanya isu Kesetaraan Gender harus terus disuarakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun 2022 memuat program/kegiatan pembangunan yang mengacu pada Renstra Dinas PPPA Provinsi Lampung tahun 2019-2024, Berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan maka program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan program/kegiatan prioritas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Berikut review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
PROVINSI LAMPUNG**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pen ting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				12.736.662.900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				12.736.662.900	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bandar Lampung	Jumlah dokumen perencanaan	17 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bandar Lampung	Jumlah dokumen perencanaan	17 Dokumen	150.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen pelaporan	8 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen pelaporan	8 Dokumen	50.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.971.260.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.971.260.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bandar Lampung	Pembayaran Gaji ASN	14 Bulan	8.571.260.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bandar Lampung	Pembayaran Gaji ASN	14 Bulan	8.571.260.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bandar Lampung	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	12 Bulan	350.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bandar Lampung	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	12 Bulan	350.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bandar Lampung	Pelaksanaan Pelaporan capaian keuangan	12 Bulan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bandar Lampung	Pelaksanaan Pelaporan capaian keuangan	12 Bulan	50.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.000.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				75.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				75.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Kepegawaian	4 Dokumen	50.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Kepegawaian	4 Dokumen	50.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bandar Lampung	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	25.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bandar Lampung	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	25.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.222.540.850	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.222.540.850	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bandar Lampung	penyediaan komponen instalasi listrik	12 Bulan	28.280.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bandar Lampung	penyediaan komponen instalasi listrik	12 Bulan	28.280.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bandar Lampung	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	150.230.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bandar Lampung	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	150.230.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bandar Lampung	penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	15.156.650	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bandar Lampung	penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	15.156.650	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bandar Lampung	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	25.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bandar Lampung	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	25.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Bandar Lampung	Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	33.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Bandar Lampung	Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	33.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bandar Lampung	Pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	79.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bandar Lampung	Pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	79.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bandar Lampung	Pelaksanaan koordiansi dan konsultasi	12 Bulan	1.891.874.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bandar Lampung	Pelaksanaan koordiansi dan konsultasi	12 Bulan	1.891.874.200	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				191.330.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				191.330.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bandar Lampung	Penyediaan peralatan	33 unit	191.330.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bandar Lampung	Penyediaan peralatan	33 unit	191.330.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				412.040.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				412.040.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bandar Lampung	Penyediaan jasa komunikasi listrik	12 Bulan	171.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bandar Lampung	Penyediaan jasa komunikasi listrik	12 Bulan	171.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bandar Lampung	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	241.040.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bandar Lampung	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	241.040.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				639.492.050	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				639.492.050	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bandar Lampung	pemeliharaan rutin kendaraan dinas	11 Unit	399.271.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bandar Lampung	pemeliharaan rutin kendaraan dinas	11 Unit	399.271.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bandar Lampung	pemeliharaan rutin peralatan kantor	150 unit	58.960.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bandar Lampung	pemeliharaan rutin peralatan kantor	150 unit	58.960.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bandar Lampung	pemeliharaan rutin gedung kantor	1 gedung	181.261.050	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bandar Lampung	pemeliharaan rutin gedung kantor	1 gedung	181.261.050	
II.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				419.345.000	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				419.345.000	
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi				194.126.000	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi				194.126.000	
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah peserta rapat pokja PUG, Focal Point, verifikasi APE, Femokrat, Rapat Driver dan Pelatihan PPRG	450 orang	194.126.000	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah peserta rapat pokja PUG, Focal Point, verifikasi APE, Femokrat, Rapat Driver dan Pelatihan PPRG	450 orang	194.126.000	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi				225.219.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi				225.219.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah perempuan miskin pedesaan peserta bimtek ekonomi kreatif	377 orang	225.219.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah perempuan miskin pedesaan peserta bimtek ekonomi kreatif	377 orang	225.219.000	
III.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				1.264.838.000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				1.264.838.000	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				541.781.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				541.781.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah peserta rapat evaluasi GT TPPO dan pelatihan kader pencegahan dan penanganan TPPO	120 orang	76.781.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah peserta rapat evaluasi GT TPPO dan pelatihan kader pencegahan dan penanganan TPPO	120 orang	76.781.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Pelaksanaan Operasional UPT PPA	100%	465.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Pelaksanaan Operasional UPT PPA	100%	465.000.000	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				344.564.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				344.564.000	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Lampung	Pelaksanaan Layanan Pengaduan	12 bulan	15.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Lampung	Pelaksanaan Layanan Pengaduan	12 bulan	15.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Pelaksanaan penyediaan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	12 bulan	329.564.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Pelaksanaan penyediaan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	12 bulan	329.564.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				378.493.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				378.493.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah peserta MOU dan penanganan korban terhadap perempuan dan anak tindak kekerasan (UPT PKTK) serta pembentukan kader perlindungan perempuan dan anak pada daerah rawan konflik dan bencana	285 Orang	245.727.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah peserta MOU dan penanganan korban terhadap perempuan dan anak tindak kekerasan (UPT PKTK) serta pembentukan kader perlindungan perempuan dan anak pada daerah rawan konflik dan bencana	285 Orang	245.727.000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Pelaksanaan penyediaan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	12 Bulan	79.366.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Pelaksanaan penyediaan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	12 Bulan	79.366.000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Lampung	Pelaksanaan penyediaan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	12 Bulan	53.400.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Lampung	Pelaksanaan penyediaan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	12 Bulan	53.400.000	
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				624.934.400	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				624.934.400	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				624.934.400	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				624.934.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Pelatihan kader P3KSS, GSI dan Ketahanan Keluarga	100 orang	624.934.400	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Pelatihan kader P3KSS, GSI dan Ketahanan Keluarga	100 orang	624.934.400	
V.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				457.093.200	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				457.093.200	
	Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi				457.093.200	Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi				457.093.200	
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Provinsi Lampung	Tersedianya data profil gender dan anak	1 dokumen	130.780.400	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Provinsi Lampung	Tersedianya data profil gender dan anak	1 dokumen	130.780.400	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah peserta forum PUSPA	100 orang	326.312.800	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah peserta forum PUSPA	100 orang	326.312.800	
VI.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				494.532.000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				494.532.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				494.532.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				494.532.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah peserta kegiatan FAD tingkat Provinsi, pembekalan FAD dan HAN	335 orang	154.528.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah peserta kegiatan FAD tingkat Provinsi, pembekalan FAD dan HAN	335 orang	154.528.000	
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	jumlah peserta pelatihan puspaga	45 orang	66.114.000	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	jumlah peserta pelatihan puspaga	45 orang	66.114.000	
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Lampung	Jumlah peserta Bimtek KHA, Evaluasi KLA dan Rapat Gugus Tugas dan Evaluasi KLA	200 orang	273.890.000	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Lampung	Jumlah peserta Bimtek KHA, Evaluasi KLA dan Rapat Gugus Tugas dan Evaluasi KLA	200 orang	273.890.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				111.098.000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				111.098.000	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				91.098.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				91.098.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah peserta kader PATBM	175 orang	91.098.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah peserta kader PATBM	175 orang	91.098.000	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				20.000.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				20.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Pelaksanaan Pendampingan kasus	12 bulan	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Pelaksanaan Pendampingan kasus	12 bulan	20.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				148.652.000	Program Pengendalian Penduduk				148.652.000	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				148.652.000	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				148.652.000	
	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola	Provinsi Lampung	Jumlah peserta sosialisasi pendidikan kependudukan dan	125 orang	48.652.000	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola	Provinsi Lampung	Jumlah peserta sosialisasi pendidikan kependudukan dan	125 orang	48.652.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kelompok Kegiatan Masyarakat		Rakor kab/kota			Kelompok Kegiatan Masyarakat		Rakor kab/kota			
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPk)	Provinsi Lampung	Jumlah peserta Sosialisasi Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPk)	80 orang	100.000.000	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPk)	Provinsi Lampung	Jumlah peserta Sosialisasi Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPk)	80 orang	100.000.000	
IX	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				61.302.000	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				61.302.000	
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal				61.302.000	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal				61.302.000	
	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Provinsi Lampung	Jumlah peserta sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	240 orang	61.302.000	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Provinsi Lampung	Jumlah peserta sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	240 orang	61.302.000	
X	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				276.086.000	Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)				276.086.000	
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				220.380.000	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				220.380.000	
	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Provinsi Lampung	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	100 orang	100.000.000	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Provinsi Lampung	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	100 orang	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Provinsi Lampung	Jumlah peserta sosialisasi edukasi dalam rangka penurunan angka stunting dan kemiskinan di kampung KB	300 orang	120.380.000	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Provinsi Lampung	Jumlah peserta sosialisasi edukasi dalam rangka penurunan angka stunting dan kemiskinan di kampung KB	300 orang	120.380.000	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				55.706.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				55.706.000	
	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Provinsi Lampung	Jumlah peserta sosialisasi dan edukasi pembangunan keluarga	40 orang	55.706.000	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Provinsi Lampung	Jumlah peserta sosialisasi dan edukasi pembangunan keluarga	40 orang	55.706.000	
	Jumlah Pagu				16.794.543.500	Jumlah Pagu				16.794.543.500	

2.5. Penelaahan Usul Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam penyusunan program kegiatan, memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku yang berkepentingan terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui rapat koordinasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, dan musrenbang perempuan dan anak. Usulan-usulan tersebut dilaksanakan melalui beberapa program yaitu : program penunjang urusan pemerintahan daerah, program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan, program peningkatan kualitas keluarga, program pengelolaan sistem data gender dan anak, program pemenuhan hak anak (pha), program perlindungan khusus anak, program pengendalian penduduk, program pembinaan keluarga berencana (kb), program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks). Program-program tersebut dianggarkan dalam rangka untuk meningkatkan anggaran responsif gender, meningkatkan perlindungan perempuan dan anak serta meningkatnya capaian kabupaten/kota layak anak di Provinsi Lampung.

**Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Provinsi Lampung**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bandar Lampung	Jumlah dokumen perencanaan	17 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen pelaporan	8 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bandar Lampung	Pembayaran Gaji ASN	14 Bulan	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bandar Lampung	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	12 Bulan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bandar Lampung	Pelaksanaan Pelaporan capaian keuangan	12 Bulan	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Kepegawaian	4 Dokumen	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bandar Lampung	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bandar Lampung	penyediaan komponen instalasi listrik	12 Bulan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bandar Lampung	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bandar Lampung	penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bandar Lampung	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	
	Penyediaan Bahan/Material	Bandar Lampung	Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bandar Lampung	Pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bandar Lampung	Pelaksanaan koordiansi dan konsultasi	12 Bulan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bandar Lampung	Penyediaan peralatan	33 unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bandar Lampung	Penyediaan jasa komunikasi listrik	12 Bulan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bandar Lampung	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bandar Lampung	pemeliharaan rutin kendaraan dinas	11 Unit	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bandar Lampung	pemeliharaan rutin peralatan kantor	150 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bandar Lampung	pemeliharaan rutin gedung kantor	1 gedung	
II.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi				
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah peserta rapat pokja PUG, Focal Point, verifikasi APE, Femokrat, Rapat Driver dan Pelatihan PPRG	450 orang	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi				
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah perempuan miskin pedesaan peserta bimtek ekonomi kreatif	377 orang	
III.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah peserta rapat evaluasi GT TPPO dan pelatihan kader pencegahan dan penanganan TPPO	120 orang	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Pelaksanaan Operasional UPT PPA	100%	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Lampung	Pelaksanaan Layanan Pengaduan	12 bulan	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Pelaksanaan penyediaan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	12 bulan	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah peserta MOU dan penanganan korban terhadap perempuan dan anak tindak kekerasan (UPT PKTK) serta pembentukan kader perlindungan perempuan dan anak pada daerah rawan konflik dan bencana	285 Orang	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Pelaksanaan penyediaan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	12 Bulan	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Lampung	Pelaksanaan penyediaan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	12 Bulan	
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Pelatihan kader P3KSS, GSI dan Ketahanan Keluarga	100 orang	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
V.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
	Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi				
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Provinsi Lampung	Tersedianya data profil gender dan anak	1 dokumen	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah peserta forum PUSPA	100 orang	
VI.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah peserta kegiatan FAD tingkat Provinsi, pembekalan FAD dan HAN	335 orang	
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	jumlah peserta pelatihan puspa	45 orang	
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Lampung	Jumlah peserta Bimtek KHA, Evaluasi KLA dan Rapat Gugus Tugas dan Evaluasi KLA	200 orang	
VII.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah peserta kader PATBM	175 orang	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	Pelaksanaan Pendampingan kasus	12 bulan	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				
	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Provinsi Lampung	Jumlah peserta sosialisasi pendidikan kependudukan dan Rakor kab/kota	125 orang	
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)	Provinsi Lampung	Jumlah peserta Sosialisasi Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)	80 orang	
IX	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal				
	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Provinsi Lampung	Jumlah peserta sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	240 orang	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
X	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				
	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Provinsi Lampung	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	100 orang	
	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Provinsi Lampung	Jumlah peserta sosialisasi edukasi dalam rangka penurunan angka stunting dan kemiskinan di kampung KB	300 orang	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				
	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Provinsi Lampung	Jumlah peserta sosialisasi dan edukasi pembangunan keluarga	40 orang	

B A B III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam RPJMN tahun 2019-2024, arah kebijakan dan strategi nasional dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan, dan Meningkatkan Kualitas Anak, dan Perempuan adalah sebagai berikut:

1. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di berbagai bidang pembangunan di tingkat pusat, daerah, dan desa, mencakup:

- a. Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan;
- b. Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender;
- c. Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG di semua bidang pembangunan;
- d. Peningkatkan kerja sama multipihak untuk mendukung pelaksanaan PUG;
- e. Penyediaan dan pemanfaatan data terpilih; dan
- f. Penguatan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di semua jenjang pemerintahan, dan;

2. Peningkatan peran dan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan, mencakup:

- a. Peningkatan pemberdayaan perempuan; dan
- b. Peningkatan koordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk memastikan perempuan mendapatkan akses dan manfaat, serta berpartisipasi dan memiliki kontrol terhadap pembangunan.

3. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak untuk memastikan anak menikmati haknya, mencakup:

- a. Penguatan layanan yang ramah terhadap anak;
- b. Penguatan koordinasi dalam meningkatkan akses layanan dasar bagi seluruh anak, termasuk yang berada pada kondisi khusus;
- c. Penguatan jejaring di komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat dalam upaya pemenuhan hak anak;
- d. Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan;
- e. Penguatan upaya pencegahan berbagai tindak kekerasan pada anak, termasuk perkawinan anak, dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (bpta); dan
- f. Peningkatan efektivitas kelembagaan melalui penegakan hukum, peningkatan kapasitas sdm, penguatan sistem data dan informasi, serta optimalisasi fungsi pengawasan.

4. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran, dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), mencakup:

- a. penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) termasuk TPPO;
- b. peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran perempuan dan masyarakat dalam mencegah dan memperoleh layanan KtP termasuk TPPO;
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan melalui penguatan koordinasi dan sinergi antarunit layanan korban KtP termasuk TPPO;
- d. peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pemerintah, dan dunia usaha dalam penanganan dan rehabilitasi korban KtP termasuk TPPO;

- e. penguatan sistem penanganan dan penegakan hukum kasus KtP termasuk TPPO; serta
- f. penguatan data terpadu untuk pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban KtP termasuk TPPO.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022

Dalam rangka mencapai tujuan, sasaran strategis dan target indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun anggaran 2022, maka dirumuskan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada serangkaian proses pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta mengantisipasi terhadap dampak-dampak yang kemungkinan dihadapi Perangkat Daerah dalam perumusan dan pengambilan keputusannya. Adapun arah kebijakan tersebut meliputi :

- a. Memperkuat pemahaman dan komitmen OPD dalam penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender/ PPRG (peningkatan anggaran)
- b. Memperkuat kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
- c. Memperkuat jejaring melalui peningkatan jumlah instansi yang bekerjasama dengan Dinas PPPA dalam pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak.
- d. Meningkatkan jumlah Lembaga Masyarakat (non pemerintah) yang difasilitasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- e. Meningkatkan persentase pelayanan tuntas bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

- f. Meningkatkan jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- g. Meningkatkan jumlah akses layanan berkualitas yang ramah anak (Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, ruang kreativitas, lingkungan ramah anak).
- h. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak
- i. Meningkatkan advokasi dan sosialisasi PUHA terhadap pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
- j. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan keluarga berencana

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :
Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD

b. Meningkatkan Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :
Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung

c. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :
Persentase terselesaikannya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

2. Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

b. Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

Cakupan KB Aktif

Tujuan dan Indikator Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tercantum pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Lampung

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Akhir 2024
1.	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	%	3,20
		Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	%	100
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	%	100
2.	Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	Cakupan KB Aktif (CPR)	%	68,24

Perincian atas target Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung selama tahun 2019-2024 tercantum pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra	
				Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024
1.	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	a. Meningkatkan Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	%	2,82	3,00	3,10	3,20	3,20
		b. Meningkatkan Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	%	86,67	100	100	100	100
		c. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	%	100	100	100	100	100
2.	Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	a. Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	Cakupan KB Aktif (CPR)	%	66,88	67,29	67,71	68,24	68,24

3.3 Rumusan Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan kebijakan dan program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2022, ditetapkan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 yang didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019–2024 yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

Perumusan Program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022 ditekankan pada program dan kegiatan yang bertujuan Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak. Program kegiatan dimaksud yaitu:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan/Material
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu

- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

- 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**
 - a. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
- 2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**
 - a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

III. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- 1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
 - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
- 2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
- c. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

IV. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

- a. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

V. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

1. Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

- a. Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
- b. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

VI. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
- b. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
- c. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

VII. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
- 2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

VIII. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

- 1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**
 - a. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
 - b. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)

IX. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

- 1. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal**
 - a. Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi

X. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

- 1. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**
 - a. Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
 - b. Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
- 2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**
 - a. Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Provinsi Lampung**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				12.736.662.900	APBD			12.736.662.900
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000	APBD			200.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Bandar Lampung	17 Dokumen	150.000.000	APBD		17 Dokumen	150.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan	Bandar Lampung	8 Dokumen	50.000.000	APBD		8 Dokumen	50.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.971.260.000	APBD			8.971.260.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji ASN	Bandar Lampung	14 Bulan	8.571.260.000	APBD		14 Bulan	8.571.260.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	Bandar Lampung	12 Bulan	350.000.000	APBD		12 Bulan	350.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pelaksanaan Pelaporan capaian keuangan	Bandar Lampung	12 Bulan	50.000.000	APBD		12 Bulan	50.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.000.000	APBD			25.000.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bandar Lampung	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	25.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				75.000.000	APBD			75.000.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian	Bandar Lampung	4 Dokumen	50.000.000	APBD		4 Dokumen	50.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bandar Lampung	30 Orang	25.000.000	APBD		30 Orang	25.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.222.540.850	APBD			2.222.540.850
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penyediaan komponen instalasi listrik	Bandar Lampung	12 Bulan	28.280.000	APBD		12 Bulan	28.280.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bandar Lampung	12 Bulan	150.230.000	APBD		12 Bulan	150.230.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	penyediaan peralatan rumah tangga	Bandar Lampung	12 Bulan	15.156.650	APBD		12 Bulan	15.156.650

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penyediaan barang cetak dan penggandaan	Bandar Lampung	12 Bulan	25.000.000	APBD		12 Bulan	25.000.000
	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Bandar Lampung	12 Bulan	33.000.000	APBD		12 Bulan	33.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	Bandar Lampung	12 Bulan	79.000.000	APBD		12 Bulan	79.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan koordiansi dan konsultasi	Bandar Lampung	12 Bulan	1.891.874.200	APBD		12 Bulan	1.891.874.200
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				191.330.000	APBD			191.330.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan peralatan	Bandar Lampung	33 unit	191.330.000	APBD		33 unit	191.330.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				412.040.000	APBD			412.040.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi listrik	Bandar Lampung	12 Bulan	171.000.000	APBD		12 Bulan	171.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bandar Lampung	12 Bulan	241.040.000	APBD		12 Bulan	241.040.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				639.492.050	APBD			639.492.050
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Bandar Lampung	11 Unit	399.271.000	APBD		11 Unit	399.271.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan rutin peralatan kantor	Bandar Lampung	150 unit	58.960.000	APBD		150 unit	58.960.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan rutin gedung kantor	Bandar Lampung	1 gedung	181.261.050	APBD		1 gedung	181.261.050
II.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				419.345.000	APBD			419.345.000
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi				194.126.000	APBD			194.126.000
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta rapat pokja PUG, Focal Point, verifikasi APE, Femokrat, Rapat Driver dan Pelatihan PPRG	Provinsi Lampung	450 orang	194.126.000	APBD		450 orang	194.126.000
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi				225.219.000	APBD			225.219.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan miskin pedesaan peserta bimtek ekonomi kreatif	Provinsi Lampung	377 orang	225.219.000	APBD		377 orang	225.219.000
III.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				1.264.838.000	APBD			1.264.838.000
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				541.781.000	APBD			541.781.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta rapat evaluasi GT TPPO dan pelatihan kader pencegahan dan penanganan TPPO	Provinsi Lampung	120 orang	76.781.000	APBD		120 orang	76.781.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Operasional UPT PPA	Provinsi Lampung	100%	465.000.000	APBD		100%	465.000.000
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				344.564.000	APBD			344.564.000
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Layanan Pengaduan	Provinsi Lampung	12 bulan	15.000.000	APBD		12 bulan	15.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan penyediaan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	Provinsi Lampung	12 bulan	329.564.000	APBD		12 bulan	329.564.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				378.493.000	APBD			378.493.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta MOU dan penanganan korban terhadap perempuan dan anak tindak kekerasan (UPT PKTK) serta pembentukan kader perlindungan perempuan dan anak pada daerah rawan konflik dan bencana	Provinsi Lampung	285 Orang	245.727.000	APBD		285 Orang	245.727.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan penyediaan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	Provinsi Lampung	12 Bulan	79.366.000	APBD		12 Bulan	79.366.000
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan penyediaan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	Provinsi Lampung	12 Bulan	53.400.000	APBD		12 Bulan	53.400.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				624.934.400	APBD			624.934.400
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				624.934.400	APBD			624.934.400
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Pelatihan kader P3KSS, GSI dan Ketahanan Keluarga	Provinsi Lampung	100 orang	624.934.400	APBD		100 orang	624.934.400
V.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				457.093.200	APBD			457.093.200
	Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi				457.093.200	APBD			457.093.200
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Tersedianya data profil gender dan anak	Provinsi Lampung	1 dokumen	130.780.400	APBD		1 dokumen	130.780.400
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah peserta forum PUSPA	Provinsi Lampung	100 orang	326.312.800	APBD		100 orang	326.312.800
VI.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				494.532.000	APBD			494.532.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				494.532.000	APBD			494.532.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta kegiatan FAD tingkat Provinsi, pembekalan FAD dan HAN	Provinsi Lampung	335 orang	154.528.000	APBD		335 orang	154.528.000
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah peserta pelatihan puspaga	Provinsi Lampung	45 orang	66.114.000	APBD		45 orang	66.114.000
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Bimtek KHA, Evaluasi KLA dan Rapat Gugus Tugas dan Evaluasi KLA	Provinsi Lampung	200 orang	273.890.000	APBD		200 orang	273.890.000
VII.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				111.098.000	APBD			111.098.000
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				91.098.000	APBD			91.098.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta kader PATBM	Provinsi Lampung	175 orang	91.098.000	APBD		175 orang	91.098.000
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				20.000.000	APBD			20.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Pendampingan kasus	Provinsi Lampung	12 bulan	20.000.000	APBD		12 bulan	20.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				148.652.000	APBD			148.652.000
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				148.652.000	APBD			148.652.000
	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi pendidikan kependudukan dan Rakor kab/kota	Provinsi Lampung	125 orang	48.652.000	APBD		125 orang	48.652.000
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)	Jumlah peserta Sosialisasi Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)	Provinsi Lampung	80 orang	100.000.000	APBD		80 orang	100.000.000
IX	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				61.302.000	APBD			61.302.000
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal				61.302.000	APBD			61.302.000
	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah peserta sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	Provinsi Lampung	240 orang	61.302.000	APBD		240 orang	61.302.000
X	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				276.086.000	APBD			276.086.000
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				220.380.000	APBD			220.380.000
	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Provinsi Lampung	100 orang	100.000.000	APBD		100 orang	100.000.000
	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah peserta sosialisasi edukasi dalam rangka penurunan angka stunting dan kemiskinan di kampung KB	Provinsi Lampung	300 orang	120.380.000	APBD		300 orang	120.380.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				55.706.000	APBD			55.706.000
	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah peserta sosialisasi dan edukasi pembangunan keluarga	Provinsi Lampung	40 orang	55.706.000	APBD		40 orang	55.706.000
				Jumlah Pagu	16.594.543.500			Jumlah Pagu	16.594.543.500

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Rencana Program dan Kegiatan, Kebutuhan Pendanaan Indikatif, Lokasi, Indikator, dan Target Tahun 2022 serta Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata sistematis dan terpadu yang merupakan penjabaran lebih rinci tentang langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Perumusan Program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022 terdiri dari 10 Program dan 22 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan yang ditekankan pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak. Program dan kegiatan dimaksud yaitu:

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				12.736.662.900	APBD			12.736.662.900
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000	APBD			200.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Bandar Lampung	17 Dokumen	150.000.000	APBD		17 Dokumen	150.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan	Bandar Lampung	8 Dokumen	50.000.000	APBD		8 Dokumen	50.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.971.260.000	APBD			8.971.260.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji ASN	Bandar Lampung	14 Bulan	8.571.260.000	APBD		14 Bulan	8.571.260.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	Bandar Lampung	12 Bulan	350.000.000	APBD		12 Bulan	350.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pelaksanaan Pelaporan capaian keuangan	Bandar Lampung	12 Bulan	50.000.000	APBD		12 Bulan	50.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.000.000	APBD			25.000.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bandar Lampung	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	25.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				75.000.000	APBD			75.000.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian	Bandar Lampung	4 Dokumen	50.000.000	APBD		4 Dokumen	50.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bandar Lampung	30 Orang	25.000.000	APBD		30 Orang	25.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.222.540.850	APBD			2.222.540.850
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penyediaan komponen instalasi listrik	Bandar Lampung	12 Bulan	28.280.000	APBD		12 Bulan	28.280.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bandar Lampung	12 Bulan	150.230.000	APBD		12 Bulan	150.230.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	penyediaan peralatan rumah tangga	Bandar Lampung	12 Bulan	15.156.650	APBD		12 Bulan	15.156.650

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bandar Lampung	12 Bulan	25.000.000	APBD		12 Bulan	25.000.000
	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Bandar Lampung	12 Bulan	33.000.000	APBD		12 Bulan	33.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	Bandar Lampung	12 Bulan	79.000.000	APBD		12 Bulan	79.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan koordiansi dan konsultasi	Bandar Lampung	12 Bulan	1.891.874.200	APBD		12 Bulan	1.891.874.200
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				191.330.000	APBD			191.330.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan peralatan	Bandar Lampung	33 unit	191.330.000	APBD		33 unit	191.330.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				412.040.000	APBD			412.040.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi listrik	Bandar Lampung	12 Bulan	171.000.000	APBD		12 Bulan	171.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bandar Lampung	12 Bulan	241.040.000	APBD		12 Bulan	241.040.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				639.492.050	APBD			639.492.050
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Bandar Lampung	11 Unit	399.271.000	APBD		11 Unit	399.271.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan rutin peralatan kantor	Bandar Lampung	150 unit	58.960.000	APBD		150 unit	58.960.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan rutin gedung kantor	Bandar Lampung	1 gedung	181.261.050	APBD		1 gedung	181.261.050
II.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				419.345.000	APBD			419.345.000
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi				194.126.000	APBD			194.126.000
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta rapat pokja PUG, Focal Point, verifikasi APE, Femokrat, Rapat Driver dan Pelatihan PPRG	Provinsi Lampung	450 orang	194.126.000	APBD		450 orang	194.126.000

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2022

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi				225.219.000	APBD			225.219.000
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan miskin pedesaan peserta bimtek ekonomi kreatif	Provinsi Lampung	377 orang	225.219.000	APBD		377 orang	225.219.000
III.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				1.264.838.000	APBD			1.264.838.000
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				541.781.000	APBD			541.781.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta rapat evaluasi GT TPPO dan pelatihan kader pencegahan dan penanganan TPPO	Provinsi Lampung	120 orang	76.781.000	APBD		120 orang	76.781.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Operasional UPT PPA	Provinsi Lampung	100%	465.000.000	APBD		100%	465.000.000
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				344.564.000	APBD			344.564.000
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Layanan Pengaduan	Provinsi Lampung	12 bulan	15.000.000	APBD		12 bulan	15.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan penyediaan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	Provinsi Lampung	12 bulan	329.564.000	APBD		12 bulan	329.564.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				378.493.000	APBD			378.493.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta MOU dan penanganan korban terhadap perempuan dan anak tindak kekerasan (UPT PKTK) serta pembentukan kader PPA pada daerah rawan konflik dan bencana	Provinsi Lampung	285 Orang	245.727.000	APBD		285 Orang	245.727.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan penyediaan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	Provinsi Lampung	12 Bulan	79.366.000	APBD		12 Bulan	79.366.000
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan penyediaan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	Provinsi Lampung	12 Bulan	53.400.000	APBD		12 Bulan	53.400.000
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				624.934.400	APBD			624.934.400
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				624.934.400	APBD			624.934.400
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Pelatihan kader P3KSS, GSI dan Ketahanan Keluarga	Provinsi Lampung	100 orang	624.934.400	APBD		100 orang	624.934.400
V.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				457.093.200	APBD			457.093.200
	Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi				457.093.200	APBD			457.093.200
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Tersedianya data profil gender dan anak	Provinsi Lampung	1 dokumen	130.780.400	APBD		1 dokumen	130.780.400
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah peserta forum PUSPA	Provinsi Lampung	100 orang	326.312.800	APBD		100 orang	326.312.800
VI.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				494.532.000	APBD			494.532.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				494.532.000	APBD			494.532.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta kegiatan FAD tingkat Provinsi, pembekalan FAD dan HAN	Provinsi Lampung	335 orang	154.528.000	APBD		335 orang	154.528.000
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah peserta pelatihan puspaga	Provinsi Lampung	45 orang	66.114.000	APBD		45 orang	66.114.000
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Bimtek KHA, Evaluasi KLA dan Rapat Gugus Tugas dan Evaluasi KLA	Provinsi Lampung	200 orang	273.890.000	APBD		200 orang	273.890.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				111.098.000	APBD			111.098.000
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				91.098.000	APBD			91.098.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta kader PATBM	Provinsi Lampung	175 orang	91.098.000	APBD		175 orang	91.098.000
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				20.000.000	APBD			20.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Pendampingan kasus	Provinsi Lampung	12 bulan	20.000.000	APBD		12 bulan	20.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				148.652.000	APBD			148.652.000
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				148.652.000	APBD			148.652.000
	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi pendidikan kependudukan dan Rakor kab/kota	Provinsi Lampung	125 orang	48.652.000	APBD		125 orang	48.652.000
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)	Jumlah peserta Sosialisasi Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)	Provinsi Lampung	80 orang	100.000.000	APBD		80 orang	100.000.000
IX	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				61.302.000	APBD			61.302.000
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal				61.302.000	APBD			61.302.000

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2022

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah peserta sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	Provinsi Lampung	240 orang	61.302.000	APBD		240 orang	61.302.000
X	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				276.086.000	APBD			276.086.000
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				220.380.000	APBD			220.380.000
	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Provinsi Lampung	100 orang	100.000.000	APBD		100 orang	100.000.000
	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah peserta sosialisasi edukasi dalam rangka penurunan angka stunting dan kemiskinan di kampung KB	Provinsi Lampung	300 orang	120.380.000	APBD		300 orang	120.380.000
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				55.706.000	APBD			55.706.000
	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah peserta sosialisasi dan edukasi pembangunan keluarga	Provinsi Lampung	40 orang	55.706.000	APBD		40 orang	55.706.000
				Jumlah Pagu	16.594.543.500			Jumlah Pagu	16.594.543.500

B A B V
PENUTUP

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 disusun berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi saat ini yang diarahkan pada upaya penguatan dan akselerasi pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lebih fokus kepada upaya pemenuhan kebutuhan sasaran masing-masing Program/Kegiatan.

Dengan adanya Renja diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan mengarah pada tepat sasaran, tepat waktu, dan dapat memacu kinerja seluruh personil/pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, selain itu dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai pertanggungjawaban terhadap tupoksi mengarah pada objektifitas terutama dalam penyusunan laporan kinerja.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun 2022 untuk dipedomani dalam pelaksanaannya oleh seluruh pemegang kegiatan sebagaimana diharapkan seluruh stakeholder.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : Maret 2021
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung,



FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19780419 199612 2 001

LAMPIRAN

MATRIK RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				12.736.662.900	APBD			12.736.662.900
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000	APBD			200.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Bandar Lampung	17 Dokumen	150.000.000	APBD		17 Dokumen	150.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan	Bandar Lampung	8 Dokumen	50.000.000	APBD		8 Dokumen	50.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.971.260.000	APBD			8.971.260.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji ASN	Bandar Lampung	14 Bulan	8.571.260.000	APBD		14 Bulan	8.571.260.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	Bandar Lampung	12 Bulan	350.000.000	APBD		12 Bulan	350.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pelaksanaan Pelaporan capaian keuangan	Bandar Lampung	12 Bulan	50.000.000	APBD		12 Bulan	50.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.000.000	APBD			25.000.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bandar Lampung	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	25.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				75.000.000	APBD			75.000.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian	Bandar Lampung	4 Dokumen	50.000.000	APBD		4 Dokumen	50.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bandar Lampung	30 Orang	25.000.000	APBD		30 Orang	25.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.222.540.850	APBD			2.222.540.850
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penyediaan komponen instalasi listrik	Bandar Lampung	12 Bulan	28.280.000	APBD		12 Bulan	28.280.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bandar Lampung	12 Bulan	150.230.000	APBD		12 Bulan	150.230.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	penyediaan peralatan rumah tangga	Bandar Lampung	12 Bulan	15.156.650	APBD		12 Bulan	15.156.650
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bandar Lampung	12 Bulan	25.000.000	APBD		12 Bulan	25.000.000
	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Bandar Lampung	12 Bulan	33.000.000	APBD		12 Bulan	33.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	Bandar Lampung	12 Bulan	79.000.000	APBD		12 Bulan	79.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan koordiansi dan konsultasi	Bandar Lampung	12 Bulan	1.891.874.200	APBD		12 Bulan	1.891.874.200
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				191.330.000	APBD			191.330.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan peralatan	Bandar Lampung	33 unit	191.330.000	APBD		33 unit	191.330.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				412.040.000	APBD			412.040.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi listrik	Bandar Lampung	12 Bulan	171.000.000	APBD		12 Bulan	171.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bandar Lampung	12 Bulan	241.040.000	APBD		12 Bulan	241.040.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				639.492.050	APBD			639.492.050
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Bandar Lampung	11 Unit	399.271.000	APBD		11 Unit	399.271.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan rutin peralatan kantor	Bandar Lampung	150 unit	58.960.000	APBD		150 unit	58.960.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan rutin gedung kantor	Bandar Lampung	1 gedung	181.261.050	APBD		1 gedung	181.261.050
II.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				419.345.000	APBD			419.345.000
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi				194.126.000	APBD			194.126.000
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta rapat pokja PUG, Focal Point, verifikasi APE, Femokrat, Rapat Driver dan Pelatihan PPRG	Provinsi Lampung	450 orang	194.126.000	APBD		450 orang	194.126.000
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi				225.219.000	APBD			225.219.000
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan miskin pedesaan peserta bimtek ekonomi kreatif	Provinsi Lampung	377 orang	225.219.000	APBD		377 orang	225.219.000
III.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				1.264.838.000	APBD			1.264.838.000
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				541.781.000	APBD			541.781.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta rapat evaluasi GT TPPO dan pelatihan kader pencegahan dan penanganan TPPO	Provinsi Lampung	120 orang	76.781.000	APBD		120 orang	76.781.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Operasional UPT PPA	Provinsi Lampung	100%	465.000.000	APBD		100%	465.000.000
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				344.564.000	APBD			344.564.000
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Layanan Pengaduan	Provinsi Lampung	12 bulan	15.000.000	APBD		12 bulan	15.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan penyediaan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	Provinsi Lampung	12 bulan	329.564.000	APBD		12 bulan	329.564.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				378.493.000	APBD			378.493.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta MOU dan penanganan korban terhadap perempuan dan anak tindak kekerasan (UPT PKTK) serta pembentukan kader PPA pada daerah rawan konflik dan bencana	Provinsi Lampung	285 Orang	245.727.000	APBD		285 Orang	245.727.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan penyediaan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	Provinsi Lampung	12 Bulan	79.366.000	APBD		12 Bulan	79.366.000
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan penyediaan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	Provinsi Lampung	12 Bulan	53.400.000	APBD		12 Bulan	53.400.000
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				624.934.400	APBD			624.934.400
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				624.934.400	APBD			624.934.400
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Pelatihan kader P3KSS, GSI dan Ketahanan Keluarga	Provinsi Lampung	100 orang	624.934.400	APBD		100 orang	624.934.400
V.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				457.093.200	APBD			457.093.200
	Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi				457.093.200	APBD			457.093.200
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Tersedianya data profil gender dan anak	Provinsi Lampung	1 dokumen	130.780.400	APBD		1 dokumen	130.780.400
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah peserta forum PUSPA	Provinsi Lampung	100 orang	326.312.800	APBD		100 orang	326.312.800
VI.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				494.532.000	APBD			494.532.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				494.532.000	APBD			494.532.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta kegiatan FAD tingkat Provinsi, pembekalan FAD dan HAN	Provinsi Lampung	335 orang	154.528.000	APBD		335 orang	154.528.000
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah peserta pelatihan puspaga	Provinsi Lampung	45 orang	66.114.000	APBD		45 orang	66.114.000
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Bimtek KHA, Evaluasi KLA dan Rapat Gugus Tugas dan Evaluasi KLA	Provinsi Lampung	200 orang	273.890.000	APBD		200 orang	273.890.000
VII.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				111.098.000	APBD			111.098.000
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				91.098.000	APBD			91.098.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta kader PATBM	Provinsi Lampung	175 orang	91.098.000	APBD		175 orang	91.098.000
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				20.000.000	APBD			20.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Pendampingan kasus	Provinsi Lampung	12 bulan	20.000.000	APBD		12 bulan	20.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				148.652.000	APBD			148.652.000
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				148.652.000	APBD			148.652.000
	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi pendidikan kependudukan dan Rakor kab/kota	Provinsi Lampung	125 orang	48.652.000	APBD		125 orang	48.652.000
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)	Jumlah peserta Sosialisasi Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)	Provinsi Lampung	80 orang	100.000.000	APBD		80 orang	100.000.000
IX	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				61.302.000	APBD			61.302.000
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal				61.302.000	APBD			61.302.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah peserta sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	Provinsi Lampung	240 orang	61.302.000	APBD		240 orang	61.302.000
X	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				276.086.000	APBD			276.086.000
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				220.380.000	APBD			220.380.000
	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Provinsi Lampung	100 orang	100.000.000	APBD		100 orang	100.000.000
	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah peserta sosialisasi edukasi dalam rangka penurunan angka stunting dan kemiskinan di kampung KB	Provinsi Lampung	300 orang	120.380.000	APBD		300 orang	120.380.000
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				55.706.000	APBD			55.706.000
	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah peserta sosialisasi dan edukasi pembangunan keluarga	Provinsi Lampung	40 orang	55.706.000	APBD		40 orang	55.706.000
				Jumlah Pagu	16.594.543.500			Jumlah Pagu	16.594.543.500

Kepala Dinas.



FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19780419 199612 2 001